

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, sehingga implementasi kebijakan selalu menarik dibicarakan dan untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada diluar lingkungan kebijakan.

Secara etimologi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyesuaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. (dalam Tachjan 2006:24).

Pendapat Cleave yang dikutip (dalam Wahab 2008:187) yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagaidemikian dapatdievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Kebijakan publik adalah yang krusial dalam proses kebijakan publik adalah krusial dalam proses Kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Mezmania dan Sabatier (dalam Wahab, 2010:123) menerangkan bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengimplementasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari konsep kebijakan publik yang dibuat.

Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan Grindel dalam (Wiyoto, 2005:31) memformulasikan pengertian implementasi kebijakan sebagai upaya menciptakan keterkaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil aktivitas pemerintah. Grindel (Wahab, 2004:59) juga memandang bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu

implementasi merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Ripley dan Farnklin (Winarno, 2008:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Seiring dengan pendapat di atas, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh indivisu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sementara itu Jones (Widodo, 2001:91-92) merumuskan batasan implementasi sebagai suatu proses mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Ia juga mendapatkan bahwa dalam implementasi tersebut, tidak kurang dari suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berupa suatu tindakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

Individu-individu maupun kelompok serta dengan mengerahkan seluruh sumber-sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasional) setelah suatu program ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelum tercapainya program tersebut.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan terlahir dari suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab suatu masalah atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat luas. Tidak semua kebijakan berlaku menjadi kebijakan publik. Ada kata kebijakan, kebijakan publik, dan kebijaksanaan. Kata-kata tersebut memiliki maksud yang hampir sama, namun sebenarnya terdapat pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu, maka sering kita temui adanya kekeliruan pendapat dan pandangan mengenai kebijakan, kebijakan publik, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Budiarjo (2013:20) “kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. “Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijaksanaan merupakan pengejawatahan ataran yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Adapun definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Dye (dalam Agustino, 2006:7) “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan untuk tidak dikerjakan”. Menurut RC Chandler dan J.C Plano (dalam Syafiie, 2006:105) “kebijakan publik adalah

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik”. Menurut A. Hoogerwerf (dalam Syafiie, 2006;105-106) “kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu”.

Pada konteks lain, menurut Islamy (dalam Anggara 2012:501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pengertian Islamy Terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik harus dengan senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut David Eatson (dalam solichin 2016:18) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public outhoritas*) dalam sistem politik, artinya kebijakan publik memiliki batas wilayah dan ketentuan berdasarkan wilayah tempat kebijakan (tergantung lokasi) beda wilayah beda juga orang atau aspek yang memiliki otoritas dalam kebijakan yang telah diatur dan ditentukan. Menurut dalam Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan

publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Pasolog (2007:39) “idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena pada dasarnya pada kepentingan publik itu sendiri”. Menurut Pasolong (2007: 39-40) pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk yaitu, (1) *regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, (4) *constituent*, yaitu ditunjukkan untuk melindungi negara.

Menurut Jenkins (dalam Nugroho, 2015:44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor menyangkut pemilihan tujuan atau alat mencapainya dalam situasi khusus dimana keputusan tersebut tercapai. Menurut Peters (dalam Nugroho, 2015:44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai jumlah tindakan pemerintah, baik bertidak secara langsung atau melalui agen, karena memengaruhi kehidupan warga negara”.

Jadi dari definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh operator Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang

bersangkutan. Yakni strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai suatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik terdiri atas: (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan, (2) target group (kelompok masyarakat yang menjadi sasaran), (3) Unsur pelaksana (implementor), (4) faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik).

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi. Modal yang pertama yaitu model Van meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016.2 158) ada 6 variabel yang membentuk kaitan(*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Adapun 6 variabel tersebut antara lain meliputi variabel ukuran-ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi sosial dan politik dan kecenderungan pelaksanaan (*implementors*). Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

4. Karakteristik badan badan pelaksana.
5. Kondisi kondisi ekonomi sosial dan politik.
6. Kecenderungan pelaksana.

Model yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino Leo 2014: 144-148) disebut dengan *Framework for Policy Implementation Analisis*. Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
3. variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Model yang keempat yaitu model George Edward III (dalam Agustino Leo, 2014: 149-153) yaitu terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu:

- a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut di

sebagian karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Ketidak jelasan peran kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu perintah yang diberikan sering berkomunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf

Sumber utamanya dalam implementasi kebijakan adalah staf titik kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebagian karena staf yang tidak mencakupi, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan langsung dengan cara melaksanakan kebijakan titik implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan itu.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Ketika wewenang ini nihil maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan titik implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana atau prasarana) Maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward (dalam Winarno 2016:155) tadi implementasi adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi Kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III karena di sesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan Walikota Pontianak Nomor 48

tahun 2020 tentang tertib kebersihan sampah di Kelurahan Sungai Jawi luar Kecamatan Pontianak Barat Selain itu mengacu pendapat Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:(1) Komunikasi,(2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

2.1.4 Konsep Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial atau industri, atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Jenis sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga, sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja atau spesifik. Contohnya: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur rempah-rempah atau sisa buah-buahan dan lain-lain yang mengalami pembusukan secara alami.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga titik sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus

fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik karet, botol dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan.

3. Sampah spesifik. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sampah yang timbul akibat bencana, bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah timbul secara tidak periodik. Contohnya: baterai, botol racun obat serangga, jarum suntik bekas dan lain-lain.

a. Pengumpulan Sampah

Sistem pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah dimulai dari tempat pewadahan/penampungan sementara/stasiun pemindahan atau sekaligus diangkut ke tempat pembuangan akhir. Menurut Arianto (dalam Yessi, 2009) ada tiga pengumpulan sampah yaitu:

1. Pengumpulan sampah (door to door) dengan compactor truck berbeda untuk setiap jenis.
2. Waktu pengumpulan door to door minimal 3x seminggu atau lebih.
3. Pengumpulan sampah juga dilakukan secara perpipaan (single house, apartemen maupun fasilitas public)

Pengambilan sampah dilakukan setiap waktu sesuai dengan priodesasi tertentu. Periodeasasi biasanya ditentukan berdasarkan waktu pembusukan sampah, yaitu kurang lebih 2-3 hari, yang berarti pengumpulan sampah dilakukan maksimal setiap 3 hari sekali, makin sering semakin baik. Pengumpulan sampah

umumnya dilakukan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (pemilik sampah, badan swasta atau pihak lainnya).

b. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah terdapat pada pengelolaan sampah dengan pengumpulan secara tidak memungkinkan untuk diterapkan pengumpulan dengan kendaraan truk secara langsung. Disamping itu juga proses ini akan sangat membantu efisiensi proses pengumpulan ke dalam truk pengangkut.

Mengingat ingkat kemampuan daya tempuh gerobak relative pendek, maka lokasi pemindahan umumnya terletak tidak jauh dari sumber sampah, masalah yang perlu diperhatikan adalah pengaruh daerah sekitar dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Lokasi pemindahan letaknya sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi truk pengangkut untuk memasuki dan keluar dari pemindahan. Pemindahan sampah ke dalam truk pengangkutan dapat dilakukan secara normal, mekanis atau campuran, tergantung dari tipe kendaraan pengangkutan.

c. Pengangkutan Sampah

Menurut peraturan Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah titik pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dilaksanakan dengan cara:

1. Pemilihan sampah

Pemilihan sampah dilakukan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga kawasan pemukiman kawasan komersial kawasan

industri kawasan khusus fasilitas umum dan fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Sistem pengumpulan sampah yaitu cara proses pengambilan sampah dimulai dari tempat pewadahan/penampungan sementara/stasiun pemindahan dan sekaligus diangkut ke tempat pembuangan akhir.

3. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah ini dilakukan pemerintah dilaksanakan dengan cara:

(a) Sampah rumah tangga ke TPS menjadi tanggung jawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW; (b) sampah dari TPS ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; (c) sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS dan TPA, menjadi tanggungjawab pengelolaan kebersihan; (d) sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah titik pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampai sesuai dengan Jenis sampah, alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan kesehatan lingkungan dan kebersihan.

4. Pengelolaan sampah

Pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS dan TPA. Pengelolaan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

5. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman titik tujuan pembuangan akhir sampah adalah sampah adalah untuk memusnahkan domestik atau yang di klasifikasikan sejenis ke suatu tempat pembuangan akhir dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak sampai atau seminimal mungkin menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

d. Pembuangan Akhir

Tempat pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari pengangkutan sampah atau diolah lebih lanjut, yang dimaksud dengan pembuangan akhir adalah cara yang digunakan untuk memusnahkan sampah padat dari hasil kegiatan pengumpulan sampah pada hasil buangan kegiatan pengolahan sampah itu sendiri titik. Tujuan pembuangan akhir sampah ialah untuk mengumpulkan sampah domestik atau yang diklasifikasikan sejenis kesuatu tempat pembuangan akhir dengan cara sedemikian rupa sehingga sampah seminimal mungkin tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan antara (*intermediate treatment*) maupun tanpa diolah terlebih dahulu titik menurut SNI 19-2454-2002 (dalam Faizah, 2008:31) tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi tiga metode, yaitu:

- 1) Metode Open dumping yaitu merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang atau menimbun sampah di satu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau pengelolaan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
- 2) Metode Controlled Landfill (penimbunan terkendali) adalah sistem Open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengendalian opt pendamping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.
- 3) Metode Sanitary Landfill (lahan saniter) yaitu sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan lapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

e. Teknik Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan pengendalian timbulan sampah secara teknis maupun non teknis (Maulany, 2015;1). Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi suatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Jika sampah dikelola dan diolah dengan baik akan menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat sehingga lingkungan menjadi bersih, pencemaran dapat diminimalisir, dan dapat tercipta beberapa barang yang bermanfaat bagi manusia. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan system kumpul-angkut-

buang, kini telah mulai mengarah pada pengelolaan sampah berupa reduce-reuse-recycle (3R). Konsep pengelolaan sampah 3R adalah;

1. Reduce (Pengurangan Volume)

Reduce merupakan upaya pengurangan timbulan sampah yang dihasilkan di sumber (penghasil sampah). Upaya pengurangan sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara merubah pola konsumsi, yaitu merubah kebiasaan menghasilkan banyak sampah menjadi lebih sedikit sampah.

2. Reuse (Penggunaan kembali)

Reuse merupakan kegiatan penggunaan kembali bahan maupun barang agar tidak menjadi sampah, seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minum untuk tempat air, dan lain-lain. Contoh bahan-bahan yang dapat digunakan lagi adalah kertas, plastik, gelas, logam dan lain-lain.

3. Recycle (Daur Ulang)

Recycle merupakan kegiatan daur ulang sampah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti mengolah plastik bekas menjadi bijih plastik untuk dicetak menjadi ember, pot bunga dan lain-lain. dan mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas untuk kembali dicetak menjadi kertas yang berkualitas rendah.

Adapun teknik-teknik pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Teknik konvensional, yaitu sampah yang dikumpulkan pada suatu tempat terbuka, ditimbun, atau dibakar

2. Teknik pemanfaatan kembali (reuse), yaitu sampah suatu kegiatan dapat digunakan oleh proses lain tanpa diolah maupun diolah terlebih dahulu.
3. Teknik daur ulang (recycle), yaitu dengan melakukan proses daur ulang maka limbah perlu dipisah dahulu antara sampah kering organik (sampah timbunan sisa makanan), sampah kering organik dan organik (plastic, kertas, gelas kaca dan logam).
4. Teknik pengelolaan terpadu merupakan cara terbaik untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R diatas (reduce, reuse, recycle). Sebelum diolah jenis sampah disortir antara yang biasa digunakan lagi dengan yang tidak bisa digunakan lagi.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan kaki yang dapat membantu penelitian untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Karena hasil penelitian yang relevan bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan perbandingan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Ratnasari, 2014. Implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah sumber daya dalam melakukan penertiban pembuangan sampah belum merata, minimnya sarana prasana pengangkut sampah dan petugas yang berada di lapangan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang penertiban pembuangan sampah. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian, yakni peneliti meneliti di kelurahan Sungai Jawi luar Kecamatan Pontianak Barat sedangkan penelitian ini di Kelurahan Benua Melayu kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan identifikasi masalah yang berbeda.

2. Siti Syahbaniah, 2018. Implementasi Peraturan Walikota Kota Pontianak Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Peneliti ini membahas permasalahan tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal dari penelitian ini masih adanya penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan di luar aturan jadwal pembuangan sampah titik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dengan menganalisis tingkat kepatuhan target group pada ketentuan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan rutinitas kegiatan serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam kebijakan titik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan masih kurang peduli akan kebersihan lingkungan dan lebih memilih untuk membakar sampah rumah tangganya dari pada membuangnya di tempat pembuangan sampah. Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang penertiban pembuangan sampah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan

Siti Syahbania bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya, sedangkan tujuan yang ingin diketahui peneliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan mengapa implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Sungai Jawi Luar belum berjalan dengan optimal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hosea AP, 2019. Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah di kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak Barat. Pada penelitian ini, Hosea membahas tentang permasalahan apa saja yang muncul akibat dari Implementasi Peraturan WaliKota Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota seperti, bagaimana komunikasi antar implementor, sarana dan prasarana dan sumberdayanya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan masalah yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah lokasi yang berbeda dan fenomena masalah yang berbeda.

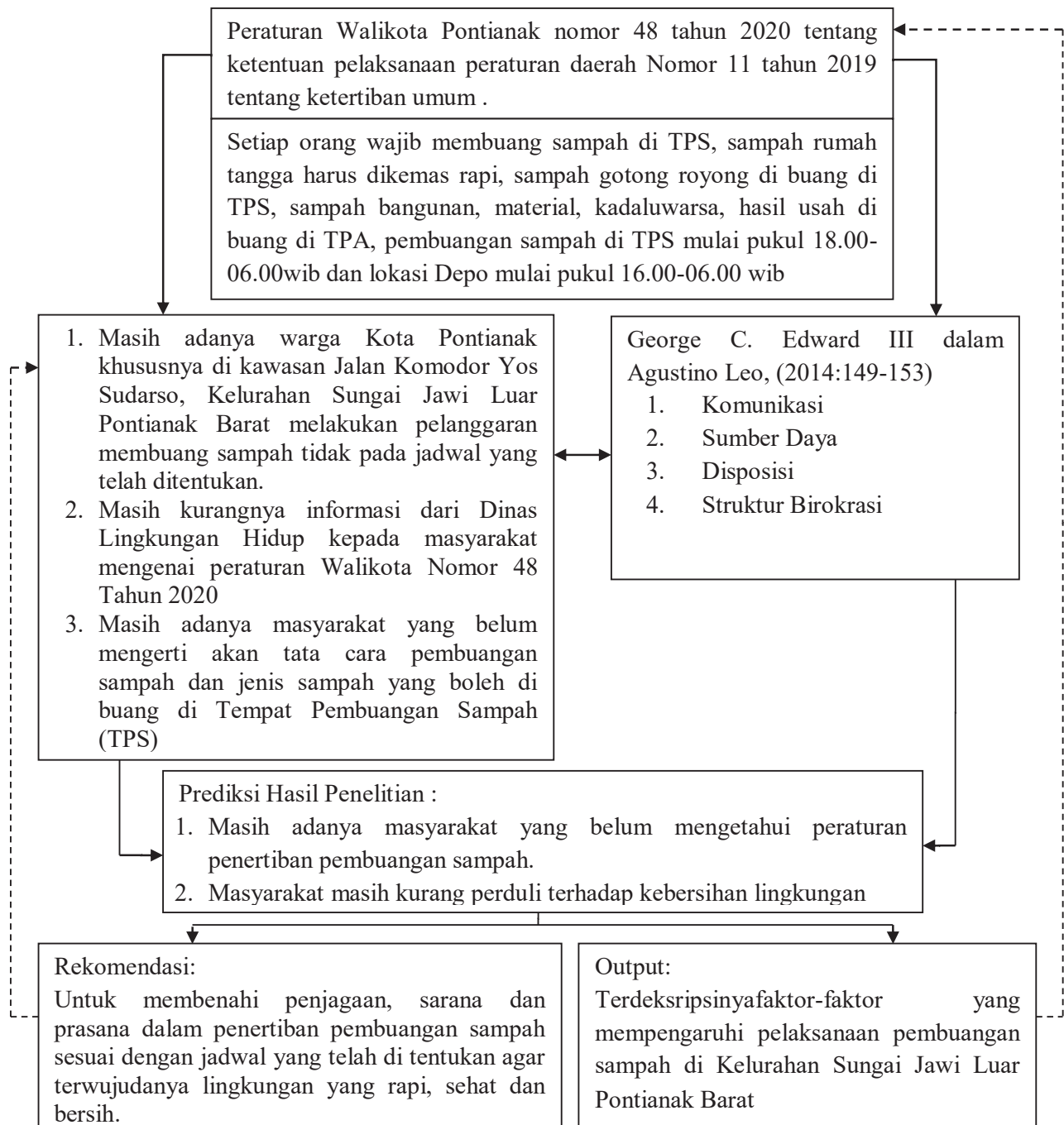
2.3 Alur Pikir Penelitian

Pada gambar 2.3 di bawah ini adalah mengenai adanya Peraturan walikota Pontianak nomor 48 tahun 2020 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum .

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini dibutuhkan indikator penilaian dalam kegiatan tersebut titik indikator penilaian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh George S.Edward III (dalam Agustino Leo, 2014: 149-153) dengan fokus penilaiannya ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian “Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan
Sungai Jawi Luar Pontianak Barat



Sumber: Della Amalia Armista, 2022

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang dilandasi kajian teoritis sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor komunikasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Sungai Jawi luar Kecamatan Pontianak Barat belum berjalan dengan baik?
2. Bagaimana ketersediaan sumberdaya implementor dalam melaksanakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Luar?
3. Bagaimana disposisi implementor dalam melaksanakan Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Luar?
4. Bagaimana struktur birokrasi implementor dalam melaksanakan Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Luar?